

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI
TRIWULAN III TAHUN 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Triwulan III	Realisasi s.d. Triwulan III	Capaian s.d. Triwulan III	Kegiatan / Upaya / Strategi / Kendala / Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	63%	87,5%	138,88%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.	12%	13,3%	110,83%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	92%	98,58%	107,15%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	N/A	Pagu anggaran sudah diajukan untuk revisi penurunan volume kegiatan ke Dirjenmiltun
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Sudah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96%	100%	104,16%	Sudah dilaksanakan melebihi target yang ditetapkan



Jambi, 9 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

Dr Eko Yulianto, S.H., M.H

NIP. 198007312002121003

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	63%	87,5%	138,88%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	12%	13,3%	110,83%
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	92%	98,58%	107,15%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pembuatan berita acara sidang sesuai SOP	Berita Acara Sidang Selesai tepat waktu	NIHIL	NIHIL
2.	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	Terlaksananya pemberitahuan isi putusan tepat waktu	NIHIL	NIHIL
3.	Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu	Terlaksananya minutasi perkara tepat waktu	NIHIL	NIHIL
4.	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	NIHIL	NIHIL
5.	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara per bulan	Terlaksananya evaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara per bulan	NIHIL	NIHIL
6.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan	Terdata dan teridentifikasi jumlah perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan	NIHIL	NIHIL
7.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan	NIHIL	NIHIL

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
8.	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota dan luar kota sesuai kebutuhan	Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	NIHIL	NIHIL
9.	Memutus perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan	Perkara yang diputus	NIHIL	NIHIL
10.	Membuat laporan untuk perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu	Adanya laporan untuk perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu	NIHIL	NIHIL
11.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	Terbentuknya Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
12.	Menyusun <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat	<i>Job Description</i> Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
13.	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan Survei Kepuasan Masyarakat	Jadwal dan perangkat Survei Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
14.	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
15.	Mendata dan merekap hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
16.	Menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	NIHIL	NIHIL
17.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melakukan tinjauan manajemen	<i>Corrective Preventive Action Request (CPAR)</i>	NIHIL	NIHIL

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	Jadwal Sidang Tundaan	NIHIL	NIHIL
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan	Berita Acara Sidang	NIHIL	NIHIL
3.	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	Putusan	NIHIL	NIHIL
4.	Menginput amar putusan dan tanggal putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maksimal 1 (satu) hari setelah sidang putusan	Data putusan di SIPP	NIHIL	NIHIL
5.	Meng- <i>upload</i> salinan putusan ke SIPP (<i>E-doc</i>)	<i>E-doc</i> salinan putusan	NIHIL	NIHIL
6.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	Hasil Evaluasi	NIHIL	NIHIL

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	75%	0%	N/A
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara	Kurangnya anggaran yang tersedia untuk sosialisasi	Mengusulkan tambahan anggaran dan mengefektifkan anggaran yang ada
2.	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara	Permohonan pembebasan biaya perkara	NIHIL	NIHIL
3.	Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara	Penerimaan perkara prodeo	NIHIL	NIHIL
4.	Mendaftarkan perkara-perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan biaya perkara	Penerimaan perkara prodeo	NIHIL	NIHIL
5.	Menerbitkan Surat Keputusan untuk pembebasan biaya perkara	Surat Keputusan Pembebasan Biaya Perkara	NIHIL	NIHIL
6.	Penunjukan majelis hakim, panitera pengganti dan jurusita pengganti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jusrita Pengganti tepat waktu	NIHIL	NIHIL
7.	Penetapan hari sidang sesuai SOP	Penetapan Hari Sidang tepat waktu	NIHIL	NIHIL
8.	Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP	Panggilan sidang secara sah, resmi dan patut	NIHIL	NIHIL
9.	Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP	Tertibnya tahapan persidangan	NIHIL	NIHIL
10.	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	Berita Acara Sidang selesai tepat waktu	NIHIL	NIHIL
11.	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu	NIHIL	NIHIL
12.	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	Minutasi perkara tepat waktu	NIHIL	NIHIL
13.	Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo	NIHIL	NIHIL
14.	Pengumuman seleksi lembaga mitra Pos Bantuan Hukum melalui website dan papan pengumuman	Pengumuman Seleksi Lembaga Mitra Pos Bantuan Hukum	NIHIL	NIHIL
15.	Pengadaan/seleksi jasa konsultasi pos bantuan hukum	Surat Perjanjian Kerjasama Posbakum	NIHIL	NIHIL

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
16.	Pemberian layanan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum	Layanan pos bantuan hukum	NIHIL	NIHIL
17.	Mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum	NIHIL	NIHIL

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	96%	100%	104,16%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mendapat putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)	Daftar perkara BHT	NIHIL	NIHIL
2.	Memeriksa kelengkapan eksekusi	Checklist kelengkapan eksekusi	NIHIL	NIHIL
3.	Menindaklanjuti permohonan eksekusi	Permohonan eksekusi	NIHIL	NIHIL
4.	Melaksanakan eksekusi	Pelaksanaan eksekusi	NIHIL	NIHIL



Jambi, 9 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H
NIP. 198007312002121003